

July 28, 2019

## GERAKAN PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TIKIPEPA KABUPATEN SORONG

Sofyan Saman<sup>1\*</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, Nelson<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

<sup>3</sup>Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

\*Korespondensi: sofyansaman33@gmail.com

### ABSTRACT

*This article aims to describe two things, namely knowing the role of the Tikipepa NGO in empowering indigenous Papuans (OAP), and the Tikipeada NGO strategy in carrying out the community empowerment process. This research uses qualitative research methods with descriptive research types, in this study data collection was carried out by means of interviews, observations and document studies. In addition, the authors determine that the informants in the research are really people who understand performance and are directly involved in the empowerment program carried out by the Tikipepa NGO. The findings of this study indicate that the Tikipepa NGO has a strategic role in encouraging the creativity of the Papuan Ali (OAP) with three priority activities, namely the creative economy movement, education & training and creativity. In addition, the strategic movement that was taken with an awareness-based approach and assistance in the form of capital, such an empowerment model was indeed not completely successful in total, but this movement gave a motive effect on a handful of indigenous Papuans. If we look at the evaluation document of the empowerment movement, it still covers 35.2% of the presentation of all the activities that have been carried out, the biggest obstacle also faced is the participation and sustainability of the implementation of the empowerment activities that have been carried out.*

**Keywords:** *Empowerment Movement, Papuan Indigenous People and NGO Tikipepa*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal yaitu mengetahui peranan LSM Tikipepa dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua (OAP), dan Strategi LSM Tikipeada dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Selain itu juga penulis menentukan informan dalam penelitian benar-benar orang-orang yang paham dengan kinerja dan terlibat secara langsung dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Tikipepa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa LSM Tikipepa memiliki peran yang strategis dalam mendorong kreatifitas Orang Asli Papua (OAP) dengan tiga kegiatan yang menjadi skala prioritas yakni gerakan ekonomi kreatif, pendidikan & pelatihan dan kreatifitas. Selain itu juga gerakan strategi yang diambil dengan pendekatan berbasis kesadaran dan bantuan berupa modal, model pemberdayaan demikian memang tak sepenuhnya berhasil secara total, tapi gerakan ini memberikan motif efek terhadap segelintir masyarakat asli Papua. Jika kita cermati dari dokumen evaluasi gerakan pemberdayaan ini masih mencakup 35.2% dari presentasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan, kendala terbesar juga yang dihadapi adalah partisipasi dan keberlanjutan dari implementasi kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan.

July 28, 2019

**Kata kunci:** Gerakan Pemberdayaan, Orang Asli Papua dan LSM Tikipepa

## PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan besar harus dilangsungkan, oleh karena itu setiap pihak harus hadir memberikan partisipasi yang serius dalam mendorong gerakan perubahan itu sehingga sesuai sasaran dan tepat pada kepentingan masyarakat di Papua. Jika dikutip dari hasil temuan dari LIPI yang merilis dari hasil temuannya bahwa masyarakat Papua umumnya memiliki beberapa masalah kompleks antara lain: sedangkan kita merujuk pada problem pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan merujuk pada *policy Brief* jaringan damai Papua (JDP) Tahun 2015 secara jelas dituliskan ada tiga masalah utama di Papua yaitu i) masalah politik, hukum dan keamanan, ii) masalah sosial ekonomi, dan iii) masalah sosial budaya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika Otonomi khusus Papua selesai dengan melihat fakta sosial perkembangan orang Papua sekarang, Kita semua sudah mengetahui bahwa ruang dan waktu berlakunya Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua hanya 25 Tahun setelah itu akan berakhir. Dari problem ini semua upaya baik itu pemerintah dan lembaga non pemerintah berusaha keras untuk menuntaskan sedikit demi sedikit untuk perubahan.

Penulis kutip dari dokumen dan poin pikiran kebijakan publik yang menjadi *public paper* di LSM Tikipepa, menunjukan satu masalah yang serius tentang tidak berdayanya masyarakat di kampung. Sedangkan banyak sekali akses dan akomodasi Dana yang besar untuk peningkatan kreatifitas dan inovasi orang-orang di kampung. Beberapa tahun terakhir ini LSM Tikipepa memang konsentrasi dalam pemberdayaan perempuan, tapi tidak sebelumnya kami mencoba untuk memfasilitasi untuk pelatihan tentang pengembangan kapasitas aparat desa. Dalam keterangan Iriato M. Ali selaku direktur, di saat penulis melakukan studi awal, menemukan satu kesimpulan bahwa peranan dan pemberdayaan dari masyarakat terjadi karena ada permintaan dan inisiatif dari lembaga. Selain itu lembaga melakukan riset dan penjangkaran aspirasi di setiap kampung, dari data yang kami temukan kemudian ditindak lanjuti dengan program pemberdayaan yang sistematis dan terprogram.

Kehadiran beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sorong mencoba untuk mendorong perubahan itu dengan memanfaatkan gerakan pemberdayaan orang asli Papua. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini pemberdayaan dalam masyarakat Akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka Akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya

July 28, 2019

fungsi dari LSM yakni dalam hal ini pemberdayaan dalam masyarakat Akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga di sebut organisasi non pemerintahan merupakan terjemahan dari asal kata *non-government organization*. Di lihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independent dan bersifat nirlaba. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didefinisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya kemunculan LSM adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan check and balances, dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses kegiatan ekonomi dan sosial dalam konteks kesejahteraan kehidupan masyarakat. Istilah pemberdayaan saat ini sudah sangat populer sebagai suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah maupun LSM. Di Indonesia istilah pemberdayaan atau empowerment pada mulanya dilakukan LSM untuk memperkuat masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan politik agar dapat merubah dan memperbaiki posisi mereka sehingga bisa berdaya saing.

Untuk membangun Papua di segala bidang demi kemakmuran dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Di dalam Undang-Undang Otsus tersebut sudah tercantum dengan jelas organisasi atau lembaga yang mempresentasikan OAP seperti Pemerintah Daerah, majelis rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (pengangkatan melalui jalur otsus) yang bekerja untuk keberpihakan hak-hak dasar OAP. Banyak program yang sudah dilaksanakan selama enam belas tahun lebih otsus berjalan tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan dan harapan dari otsus tersebut. Berbagai persoalan muncul ketika adanya otsus baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dari pusat juga mempunyai adil dalam mempengaruhi implementasi otnomi khusus Papua. Tumpang tindih aturan yang menyebabkan berbagai persoalan telah terjadi di tanah Papua, salah satunya adalah perebutan kekuasaan di daerah pemekaran baru sehingga OAP sendiri hidup saling bersaing suku demi memperoleh jabatan dan kekuasaan yang berakibat timbulnya primordialisme-primordialisme kesukuan.

Dari informasi yang penulis himpun dari media, menunjukkan bahwa peranan strategis yang dibangun oleh LSM Tikipepa di Kabupaten Sorong mengambil peran dengan mendorong gerakan pemberdayaan yang menitik beratkan pada kreatifitas dan daya inovasi Orang Asli Papua (OAP). Mengutip pendapat dari direktur LSM Tikipepa bahwa kehadiran LSM ini semata-

July 28, 2019

mata membantu dan mendorong akselerasi pembangunan Orang Asli Papua (OAP), kami bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah melakukan pelatihan pembuatan kue, latihan menjahit, khusus untuk perempuan asli Papua. Dengan harapan luaran dan hasil dari pelatihan ini bisa meningkatkan produktivitas perempuan Papua.

Nah hal selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah menyiapkan akses pasar untuk hasil karya dari perempuan Papua tersebut. Satu kendala bagi gerakan pemberdayaan adalah tidak berkelanjutan dari hilir sampai hulu. Kami saat ini menyiapkan program dari hilir sampai hulu ini diutamakan kepada perempuan yang berada di kampung-kampung, itu pun kami identifikasi mana saja yang menjadi skala prioritas dan sesuai dengan potensi dasar yang mereka miliki. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk mengangkat satu tema penelitian tentang: Gerakan Pemberdayaan Orang Asli Papua dalam Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tikipepa di Kabupaten Sorong.

## **METODE**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang ada pada masa sekarang. Pemecahan masalah aktual tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan yang meliputi: pengumpulan data, menyusun, menganalisis, interpretasi dan membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di LSM Tikipepa Kabupaten Sorong.

Menurut Sugiyono (2006) sampel adalah orang-orang yang paham dan terlibat secara langsung tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Tikipepa. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data yaitu usaha menyeleksi, menyusun dan menafsirkan data yang telah masuk dengan tujuan agar data tersebut dapat dimengerti isi dan maksudnya, sebab data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, belum bisa dibaca secara optimal sebelum dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tikipepa dalam Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua**

Peranan LSM menjadi penting dalam mengisi agenda pembangunan, gerakan LSM bagian dari pada dimensi penting dalam mendorong percepatan dan mengakselerasi pembangunan manusia. Kendati demikian kita menyadari bahwa langka perubahan yang LSM tidak terlepas dari donatur yang konsisten. Secara konsepsi jelas bahwa LSM bekerja diluar dari satu mekanisme pemerintah, tapi tidak bertentangan dengan mekanisme pemerintah, Humaidi, Z. (2009) sebagaimana kita ketahui bahwa istilah LSM sendiri merupakan turunan dari istilah NGO (*Non-Governmental Organization*). Sebuah keputusan taktis diambil pada tahun 1983, istilah NGO tidak lagi digunakan untuk kemudian diganti dengan istilah LSM/ LPSM. Istilah NGO

---

July 28, 2019

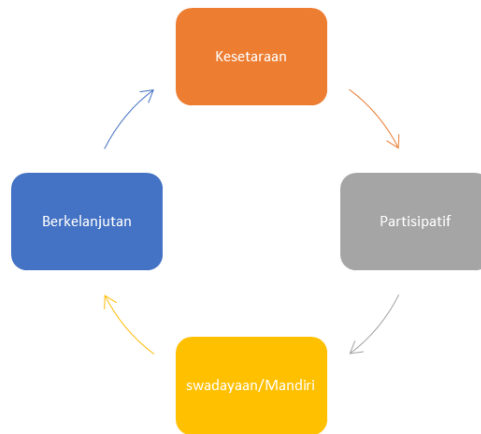
dapat secara mudah ditafsirkan sebagai non-pemerintah. Sebaliknya kata "swadaya" mengandung dimensi penentuan diri sendiri yang menang menjadi sifat dasarnya, dan pada saat yang sama lebih berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa.

Konteks LSM Tikipepa kurang lebih sama pada suatu filosofi gerakan dalam mendorong pembangunan pemberdayaan. Menurut Ketua LSM Irianto M. Ali, saat di interview oleh penulis menjelaskan bahwa LSM Tikipepa bekerja berdasarkan dari hasil kajian, tentu dengan proses observasi yang mendalam untuk merumuskan satu konsep kebijakan. Seketika kami berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sorong. Berangkat dari temuan-temuan kami soal ketidak meratanya pembangunan, seperti pengrusakan fasilitas pendidikan dan problem pendidikan lainnya. Maka LSM Tikipepa mengambil langka-langka penting dan strategis untuk akselerasi pembangunan, lebih real dari kami misalnya menghubungkan atau memfasilitasi bantuan dalam bentuk dari personal dan institusi untuk memenuhi kekurangan, seperti fasilitas pendidikan. Dan bahkan kajian kami menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Menurut Afan Gaffar (Stephanus Pelor, S. H. 2018) LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Muhammad AS. Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan *civil society* merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Tujuannya LSM Tikipepa jelas bahwa ketiga agenda-agenda ini kami jalankan itu memiliki legalitas. Sehingga tidak di ragukan eksistensi dan keberadaan lembaga ini setelah itu kami coba melakukan proses pendampingan pemberdayaan masakan papua khususnya lewat beberapa agenda yang telah kami lakukan. Kami juga bekerja sama dengan kampung Klabot jadi ada 3 (tiga) agenda sekali gus, yang kemudian kami lakukan dan kerja sama dengan kampung Klabot, distrik Klabot, lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat melalui kampung sekaligus bekerja sama dengan kampung binaan kami kampung Klabot. Pemberdayaan yang kami lakukan adalah seiring dengan visi kami menyangkut dengan pendampingan dan pemberdayaan yang kami lakukan yaitu program jahit menjahit, berupa pelatihan secara langsung dengan tenaga proporsional yang kami siapkan untuk mendampingi mereka selama dua bulan lamanya.

July 28, 2019

Gambar I: Prinsi Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: *Kodifikasi dari Pemberdayaan (Riadi, 2017)*

Peranan strategis dari LSM Tikipepa memang memiliki sasaran dari masyarakat yang tidak berdaya, dikarenakan multi masalah yang mereka hadapi. Dari tahapan LSM sendiri senantiasa melakukan proses identifikasi masyarakat baik itu masyarakat pendatang (Bukan OAP) dan masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Proses identifikasi menunjukan dan bisa mendeskripsikan satu masalah tentang yang harus diselesaikan, salah satunya adalah mendorong peningkatan kapasitas dari Mama Asli Papua, tentu dengan tujuan bahwa peningkatan kapasitas dan inovasi mama Papua akan berefek langsung pada peningkatan produktifitas inovasi. Yang kami lakukan adalah pelatihan menjahit dan inovasi tas noken dengan menggunakan benang sitetik. Yang kedua ada pelatihan komputer yang melibatkan pemerintah kampung Klobot, ini bentuk pemberdayaan untuk melatih mereka kami juga menyiapkan tenaga proporsional yang siap melakukan pelatihan kepada mereka. Pelatihan manajemen pelaporan dana kampung menjadikan sistem keuangan keuangan kampung transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan proses kontrol dari masyarakat. Kegiatan ini bagian dari kegiatan kolaboratif yang antara LSM, Masyarakat dan Pemerintah setempat. Pahri, P. (2017) hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua model pemberdayaan masyarakat perempuan asli Papua yaitu: 1) Pemberdayaan melalui bantuan modal. 2) Pemberdayaan melalui pelatihan. Sedangkan dampak pemberdayaan terhadap masyarakat perempuan asli Papua adalah: 1) Kebebasan Mobilitas. 2) Kemampuan membeli komoditas kecil dan besar. 3) Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga. 4) Kesadaran akan hukum dan politik. Jika dari penelitian menemukan model pemberdayaan untuk mama Papua dengan strukturnya adalah mendorong perubahan dengan memberikan pemodal dan konstruksi kapasitas, hal utama dalam pemberdayaan sesungguhnya adalah proses kesadaran/mind set.

Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Teras Kitorang Peduli Papua (Tikipepa) hadir untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat sehingga pendampingan-pendampingan ini akan terus kami lakukan. Kami punya program kolaborasi untuk peningkatan kapasitas

July 28, 2019

masyarakat distrik dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu distrik Sayosa, distrik Klamono, Kami juga konsisten ke pendidikan dengan coba menghadirkan situasi yang berbeda karna kondisi pendidikan kita hari ini fasilitas maupun sumberdaya manusia yang ada, kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan baik, kami menyadari bahwa urusan ini menjadi urusan kita bersama.

Sumodiningrat (2014) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); 2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); 3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.

#### Gerakan II: Pemberdayaan LSM Tikipepa



Sumber: *Data Primer di Olah Penulis*

Dari uraian pendapat dan definisi konsep dari gerakan pemberdayaan tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk melihat beberapa hal yang menjadi perhatian. Dalam dokumen kebijakan kinerja yang dilakukan oleh LSM Tikipepa, maka kemudian penulis mencoba untuk mendalami apa yang telah menjadi dasar dalam kegiatan pemberdayaan dalam konteks Gerakan Sosial. Kami juga berkunjung ke kampung-kampung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya disana muda-mudahan LSM ini menjadi corong penyambung lidahnya bapa ibu yang ada di kampung-kampung dan pemerintah daerah. Beberapa kesempatan kami telah beraudiensi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi-informasi dan juga kami beraudiensi dengan teman-teman yang ada di DPR untuk menyampaikan informasi secara riil yang terjadi di lapangan, itu cara kami memperdayakan masyarakat asli Papua.

July 28, 2019

## Fungsionalisasi dan Tahapan Strategi LSM Tikipepa dalam Pemberdayaan Masyarakat asli Papua

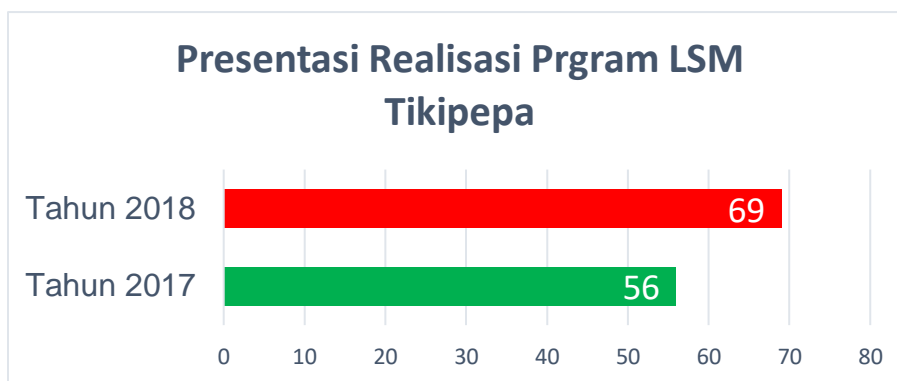
Strategi dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat asli Papua (OAP) kami kenal dengan urusan dari matahari terbit sampai matahari terbenam atau (proses hulu s/d hilir). Yang di pahami sebagai urusan dari perubahan menseset/pola pikir (kesadaran), pemberian fasilitas dan penyediaan pasar. Nah tiga hal ini sering menjadi masalah yang dihadapi oleh orang asli Papua (OAP). Ways (2015) NGO/ Ornop juga harus melakukan model strategi *planning* seperti organisasi atau komunitas yang lain agar lembaga tersebut jelas kemana arahnya, apa cita-citanya dan apa strategi *planning*, sehingga menjadi rujukan inti dari setiap aksi ornop/NGO tersebut dalam mencapai cita-cita. Strategi *Planning* juga akan memperjelas tata kelola dan bisa berkontribusi untuk peningkatan kapasitas organisasi bagi LSM/NGO atau Ornop, ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum, saat dan setelah melakukan Strategi *Planning* bagi sebuah LSM/NGO/Ornop, yakni: 1) Memahami apa itu strategi *planning* (siapa kita, apa kapasitas yang kita memiliki; Apa masalah, isu kritis, apa prioritas, apa yang kita hadapi); 2) Merencanakan kegiatan sebagai *planning* (Penjadwalan (*timing*), siapa yang terlibat dan siapa yang memfasilitasi; 3) Menentukan ruang lingkup Strategi *Planning*; 4) Menentukan *framework* strategis; dan 5) Penyesuaian hasil strategi *planning* untuk internal lembaga.

Pihak LSM Tikipepa lakukan perubahan menseset dengan memberikan pelatihan atau pendidikan non-formal, upaya ini dengan cara pelatihan anyaman, menjahit dan pelatihan pintar komputer (Pintar-KO). Kegiatan ini semata adalah bagian dari pada upaya untuk meningkatkan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) luar dari agenda pendidikan formal, bukan saja pelatihan teknis tapi ada materi yang diberikan oleh fungsionaris dan instruktur profesional dari kalangan akademis dan praktisi untuk memberikan pencerahan. Dengan harapan bahwa materi ini bisa mengangkat mentalitas peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Soetomo (Mubarak, 2010) pemberdayaan dalam pengembangan kapasitas menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Hal itu semata-mata kesadaran masyarakat yang kemudian itu berefek kepada daya partisipasi masyarakat dalam peningkatan indeks kesejahteraan hidup dan peningkatan *planning* hidup yang berefek pada perubahan di level yang lebih produktif.



July 28, 2019

Gambar III: Infografi Presentasi Realisasi Program

Sumber: *Dokumen LPJ (2017/2018)*

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh LSM Tikipepa bagian dari pada upaya program pendidikan non-formal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Skema mencerdaskan publik juga telah dijelaskan secara regulasi. Soetomo (2011) rangka pengembangan kapasitas masyarakat, tidak tabu bagi peranan pihak eksternal. Apabila pengembangan kapasitas tersebut ditujukan pada masyarakat lokal, maka pihak eksternal adalah mereka yang berasal dari luar masyarakat lokal yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat. Pihak eksternal ini dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Sudah tentu sesuai pendekatan pemberdayaan, peranan mereka harus ditempatkan sebagai bagian dari enabling process. Oleh sebab itu, yang dominan semestinya tetap masyarakat yang bersangkutan. Itulah sebabnya berbagai upaya dari luar ini lebih tepat disebut sebagai stimuli eksternal, oleh karena lebih bersifat mendorong dan merangsang tumbuh dan berkembangnya potensi serta energi internal. Sebagai sebuah stimuli sudah tentu keberadaannya hanya sementara, karena setelah kapasitas internal dapat ditumbuhkan maka stimuli dihentikan.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya. Salah satunya dan yang paling penting adalah tidak atau belum digunakannya pendekatan yang tepat dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat melalui proses pemberdayaan tersebut. Tidak sedikit pihak-pihak yang berpikir keliru tentang pendekatan dalam pengembangan kapasitas. Kebanyakan orang melihatnya sebagai sekadar upaya membantu masyarakat, sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sulit asal tersedia dana dan perangkatnya, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memperhatikan proses dan pendekatannya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses pengembangan kapasitas bukan hal muda, peserta harus dikawal dan di dampingi hingga bisa memiliki perubahan. Oleh karena itu Ketua Irianto M. Ali menegaskan bahwa kelemahan terbesar kami yang sulit dikerjakan adalah proses pengawalan yang rutin, hal itu dikarenakan keterbatasan dana, oleh karena itu strategi kami untuk kelangsungan itu terus berkesinambungan maka LSM Tikipepa menyerahkan hasil

July 28, 2019

kegiatan ini kepada pihak pemerintah untuk terus mengawasi dan melakukan pembinaan dengan jalan Kolaborasi. Hal-hal penting dalam pengembangan kapasitas sehingga terbentuk pola pikir yang baik, kepemimpinan dan mentalitas bertanggungjawab. Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang. Garlick dalam Mc Ginty (Mubarak, Z. 2010) menyebutkan lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut: 1) Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar; 2) Kepemimpinan; 3) Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi; 4) Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama mencapai tujuan; 5) Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat.

Pemberian bantuan dilakukan secara kolektif dan terus dikawal hingga proses implementasi bantuan itu terealisasi dan memberikan nilai manfaat untuk masyarakat. Walau dipahami proses ini bukan hal muda dan berjalan dengan cepat, membutuhkan waktu dan konsistensi yang tinggi untuk menuntaskan kegiatan-kegiatan pendampingan. Bantuan tergantung kebutuhan kepentingan, misalnya setelah pelatihan menjahit maka bantuan sesuai kompetensi yang telah terbentuk, biasanya mesin jahit, kain dan sedikit dana pembinaan untuk operasional dari kegiatan menjahit tapi bersifat kolektif atau kelompok. Bantuan yang sama juga untuk kelompok pelatihan pintar komputer (Pintar-KO) bantuan fasilitas komputer, dengan catatan pengembangan pengetahuan bisa terus ditularkan kepada generasi muda. Harapan-harapan keberlanjutan itu menjadi harapan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Tikipepa.

Strategi khusus yang dilakukan LSM Tikipepa yang dijelaskan oleh Irianto M. Ali, menjelaskan dengan fungsionalisasi dari model strategi yang dilakukan:

*Pertama*, Strategi pendekatan persuasif kepada pemerintah kampung dengan harapan bahwa pemerintah kampung bisa menggerakkan partisipasi dari masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan yang sudah menjadi program lembaga. Kedua, strategi kolaborasi dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan soal bagaimana pengembangan kampung baik itu Dinas Pemberdayaan kampung maupun stekholden-stekholden yang terkait. Jadi ini langkah strategi kami sehingga bisa dekat langsung menyentuh langsung, dengan bapa ibu yang ada di kampung, misalnya kerja Sama kami dengan pemerintah kabupaten dari pemerintah kabupaten kami juga bekerja sama dengan Distrik-Distrik terkait. *Ketiga* adalah kami melekkukan pendampingan secara langsung, pes to pes jadi ibu-ibu dan bapa-bapa yang ingin terlibat dalam pelatihan, kami langsung datangkan ke sekretariat untuk mengikuti pelatihan kami mengajari langsung sehingga ketiga bapa ibu yang ketidak paham langsung bertanya ke narasumber kami pendampingan step by step secara langsung sehingga sistematis, itu strategi kami setelah kami bina setelah kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Luar biasa mereka sendiri jahit menjahit batik sendiri, rok sendiri ini luar biasa makanya ini kita butuh

---

July 28, 2019

profesionalitas kita butuh kesadaran akan memiliki negri ini. *Empat* adalah kami sering berdiskusi dengan Baba/Ibu pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan jika kendala yang dihadapi.

Fungsionalisme strategi adalah bagian dari pada cara LSM Tikipepa untuk memaksimalkan kerja-kerja sehingga terukur dan tercapainya program-program strategis. Upaya yang ditetapkan bisa memberikan efek perubahan terhadap masyarakat asli Papua (OAP).

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, maka peranan LSM Tikipepa memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Papua (OAP), oleh karena itu LSM Tikipepa memberikan motif efek di jalan perubahan. Peranannya mendorong masyarakat di Kampung untuk hadir mengikuti pelatihan seperti menjahit dan pintar komputer (Pintar-KO), target yang ditempuh adalah berharapan orang asli Papua (OAP) yang mendapat sentuhan dan pembinaan dari LSM Tikipepa meningkatkan inovasi dan kesejahteraan hidup. Harapan besar lainnya masyarakat dalam pelatihan itu bisa meningkatkan kapasitas (kesadaran), personal leadership dan mentalitas bertanggung jawab.

Berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan dihadapi dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat LSM ini mampu memberikan perannya yang baik bagi masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Sebagai salah satu dari lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong ini bisa memberikan peran yang sangat besar dalam hal memperdayakan masyarakat Orang Asli Papua. melalui program pembangunan, infrastruktur, kesehatan pendidikan, ekonomi dan pembelaan hak-hak masyarakat.

Proses pemberdayaan kesejahteraan masyarakat ini merupakan Proses yang sekunder, hal ini dikarenakan bahwa LSM Tikipepa dalam proses pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Sorong dengan memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat Papua, agar masyarakat OAP sadar akan permasalahan yang dihadapi dan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Stephanus Pelor, S. H. (2018). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131-146.
- Humaidi, Z. (2009). *Peranan LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Atas Perubahan Paradigmatis Gerakan LSM di Indonesia)*. *Sosio Informa*, 14(3).

---

July 28, 2019

Pahri, P. (2017). *Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R & D*. Bandung:

Sumo diningrat G, 2010 *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Kompas Gramedia. Jakarta.

Zainal Arifin, 2011. *Penelitian Kualitatif Metode Dan Paradikma Baru*.

<https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html> (diakses pada 7 Mei 2021).

Undang Undang No 32 Tahun 2009 ketentuan-ketentuan pokok pokok pengelolaan lingkungan hidup.